

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan (pemerintah daerah) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan pemerintah daerah dan bendahara umum daerah setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara, laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Penyusunan laporan keuangan dijelaskan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, yaitu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada kepala daerah. Laporan keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan akan mengukur kinerja yang telah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, terdapat empat kelompok utama yang

membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Empat kelompok utama tersebut, yaitu: masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; pemerintah. Dalam *statement* nomor 34 *Governmental Accounting Standards Board (1999)* tentang *Objectives of Financial Reporting* menjelaskan bahwa Pemerintah harus melaporkan kepada masyarakat, dewan perwakilan serta pemberi dana sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintahan.

Banyak pihak yang membutuhkan dan mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Sehingga, informasi dari laporan keuangan haruslah memiliki akuntabilitas. Dalam *statement* nomor 34 *Governmental Accounting Standards Board (1999)* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa laporan keuangan dapat mencakup informasi-informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi di dalamnya terdiri a). Perbandingan hasil keuangan secara faktual dengan anggaran yang telah diputuskan secara legal, b). Menilai kondisi keuangan dan hasil dari operasi usaha, c). Membantu dalam menentukan hubungan antara keuangan dengan hukum dan peraturan serta, d). Membantu dalam mengukur efisiensi dan efektivitas.

Menurut Thebora, dkk (2017) untuk mencapai akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah haruslah memiliki nilai informasi yang baik dengan bentuk ketepatanwaktuan laporan keuangan yang dibuat dan dipublikasi serta dapat

diandalkan. Selain itu, perlu faktor-faktor yang menunjang laporan keuangan dapat memiliki nilai informasi yang baik seperti kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam membuat laporan keuangan, pemanfaatan teknologi yang mendukung serta sistem pengendalian intern.

Keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan masih menjadi masalah dalam pemerintah daerah, maka laporan keuangan yang disajikan masih menarik untuk dilakukan kajian maupun penelitian. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dan 2015, memperoleh pernyataan opini wajar tanpa pengecualian. Kabupaten Semarang memperoleh pernyataan opini wajar tanpa pengecualian oleh badan pemeriksa keuangan 2 periode akuntansi secara berturut-turut. Tribunjateng.com (Setiawan, D. 2018) Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang memaparkan 9 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang terkemas dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan system pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,46 triliun. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2018. Terdapat penjelasan bahwa masalah ketidakpatuhan yang berdampak financial terjadi sebanyak 5.172 (64%) dari 8.030 permasalahan dengan

permasalahan senilai Rp10,06 triliun. (Sumber [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS I Tahun 2018)

Kejadian pada kasus tersebut menandakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan memiliki nilai informasi yang kurang memiliki akuntabilitas. Terbukti dengan masih banyaknya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Padahal keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur penting agar nilai informasi pada laporan keuangan menjadi baik.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 telah menjelaskan secara detail karakteristik dari laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan akan menentukan nilai dari informasi laporan keuangan tersebut. Pertama yaitu andal, laporan keuangan yang andal merupakan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material, tidak menyesatkan, jujur sesuai fakta, dan dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan andal jika penyajian jujur, dapat diverifikasi, netral. Selanjutnya yaitu relevan, laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat mengevaluasi dan membandingkan laporan keuangan masa lalu dan masa kini serta dapat memprediksi masa depan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.

Ritonga (2010) dalam Halim dan Amriani (2014) mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah karena banyaknya temuan yang terjadi

dikarenakan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Amriani (2014) menyatakan perlunya pelatihan kepada setiap pemangku kepentingan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. Di samping itu, peran dari seluruh pemangku kepentingan termasuk penghasil akuntan yaitu perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Menurut Annisa (2014) menyatakan bahwasanya kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, yang mana keterandalan dan ketepatanwaktuan harus selalu ditingkatkan sebagai laporan keuangan yang benar jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung pertimbangan Yusuf (2016) sangat berpengaruh signifikan.

Pemanfaatan teknologi merupakan faktor pendukung untuk menciptakan terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki ketepatanwaktuan dalam penyajian serta dapat diandalkan nilai informasi di dalamnya. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 serta diperkuat dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 yang menjelaskan terkait sistem informasi keuangan daerah. Peraturan tersebut mengatur terkait batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta terkait dana perimbangan yang tertunda apabila terlambat dalam melakukan penyampaian. Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah

dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai serta pemanfaatan teknologi yang baik akan meningkatkan nilai informasi pada laporan keuangan pemerintah sehingga dalam penyampaiannya dapat memiliki ketepatanwaktuan serta dapat diandalkan. Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2011), serta Nurillah (2014). Akan tetapi Annisa (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh sama sekali terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan dalam laporan keuangan.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjelaskan terkait 5 unsur dari sistem pengendalian intern pemerintahan. Dalam lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerja, melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Menurut Aditya (2015) dan Annisa (2014) bahwasanya Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh terhadap keandalan dalam laporan keuangan, sedangkan menurut Karmila dan Amries (2014) tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan

keuangan. Maka perlu ditingkatkannya kinerja pengendalian intern yang baik untuk tepatwaktu dalam pelaporan keuangannya, Annisa (2014)

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN LAPORAN KEUANGAN.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030(51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,46 triliun, dan adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara peneliti terdahulu yang mengacu pada variabel tersebut, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?

4. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
5. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
7. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?
8. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Kabupaten Semarang?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi di daerah Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.
3. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.



4. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara simultan terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Semarang.
5. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal ketepatan waktu penyajian.
6. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi di daerah Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal ketepatan waktu penyajian.
7. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern Kabupaten Semarang terhadap laporan keuangan dalam hal ketepatan waktu penyajian.
8. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara simultan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan di Kabupaten Semarang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan nilai informasi dalam ketepatanwaktuan serta keterandalan laporan keuangan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

##### **BAB III : Metode penelitian**

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

##### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

##### **BAB V : Penutup**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.